

KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI WILAYAH CILENGGANG

Mohamad Noviar Widodo¹, Moh. Khoirul Anam^{2*}

^{1,2}Prodi Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cirendeu
Ciputat Tangerang Selatan, 15419

*m.khoirulanam@umj.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah sebagai lembaga masyarakat ingin membangun masyarakat berbasis keluarga, salah satunya mensejahterakan keluarga serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program yang dirancang untuk setiap kampung. Program Kampung KB merupakan salah satu program dalam mengatasi masalah kependudukan di Indonesia dan untuk membangun keluarga sejahtera. Kampung KB adalah salah satu produk yang dicetuskan oleh Presiden RI dengan tujuan membangun negara Indonesia untuk menjadi negara yang sejahtera, di mulai dari daerah pinggiran atau tertinggal. Rumah tangga mempunyai arti bahwa bentuk dan corak kehidupan masyarakat ditentukan oleh situasi kehidupan rumah tangga atau keluarga. Apabila setiap keluarga atau rumah tangga tertib dan teratur, maka bentuk suatu masyarakat itu akan tertib dan teratur pula demikian sebaliknya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah input dari proses kegiatan kampung KB belum sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang dilakukan masih kurang efektif serta kurang terstruktur karena kegiatan yang dilakukan ini berdampak dengan antusias warga maka kurang terkendali dalam menjalankan kegiatan ini.

Kata kunci: Kampung KB; masyarakat berbasis keluarga

ABSTRAK

The government as a community institution wants to build a family-based society, one of which is to prosper the family and meet the community's needs through programs designed for each village. The KB Village Program is one of the programs to overcome population problems in Indonesia and to build a prosperous family. Kampung KB is one of the products that was sparked by the President of the Republic of Indonesia with the aim of developing an Indonesian state to become a prosperous country, starting from the periphery or being left behind. Household means that the form and style of community life is determined by the situation of the household or family life. If every family or household is orderly and organized, then the form of a society will be orderly and orderly and vice versa. This research method uses descriptive qualitative method. Data collection techniques were carried out by interview, observation, and study documentation. The results of this study are input from the process of family planning activities not yet in accordance with the planned activities to be carried out. The activities carried out are still ineffective and less structured because the activities carried out have an impact with the enthusiasm of the residents so they are less controlled in carrying out these activities.

Keywords: Kampung KB, family-based society

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik, negara Indonesia memiliki laju pertumbuhan mencapai 1,32 % atau 3 juta jiwa pertahun pada tahun 2014-2015. Perjalanan pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan penduduk muda (youth dependency ratio) di Indonesia membentuk keadaan ideal yang menghasilkan potensi terjadinya bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia kerja hampir dua kali dibandingkan dengan jumlah penduduk di bawah 15 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia telah menurun dari 49.3/100 pada tahun 2013 menjadi 48.9/100 pada tahun 2014 dan turun menjadi 48.6/100 tahun 2015 (BPS, 2015).

Kota Tangerang Selatan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Pada tahun 2016 penduduk kota tangerang selatan sekitar 1.593.812 Sedangkan pada tahun 2017 penduduk kota tangerang selatan sekitar 1.644.899. Kepadatan penduduk ini meningkat dari tahun 2011 yang hanya berjumlah 1.346.102. Kota Tangerang Selatan ini merupakan kota yang terletak di provinsi Banten, Indonesia. Dari segi jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang serta terbesar kelima di kawasan Jabodetabek setelah Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok. Wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang.

Pergerakan laju pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan yang terus meningkat dapat dikendalikan dengan adanya program keluarga berencana. Pembangunan gerakan keluarga berencana nasional ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah melakukan beberapa strategi diantaranya adalah penerapan model kampung keluarga berencana. Kampung keluarga berencana merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan kementerian/lembaga, mitra kerja, stakeholders & instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan ditingkatkan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung keluarga

berencana) diseluruh kabupaten dan kota. Daerah di Kota Tangerang Selatan yang menjadi tempat terimplementasikannya program kampung keluarga berencana adalah di RW 12 Wilayah Cilenggang.

Indikator output dari program kampung keluarga berencana salah satunya adalah meningkatnya kualitas dalam ber-KB yaitu dengan menurunnya peserta metode kontrasepsi jangka pendek dan meningkatkan peserta Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Berdasarkan hasil wawancara dengan kader di RW 12 kelurahan Cilenggang bahwa rata-rata PUS (Pasangan Usia Subur) yang ada di wilayah Cilenggang Tangerang Selatan sudah memakai metode kontrasepsi jangka Panjang. Menurut kader Wilayah Cilenggang bahwa masyarakat yang ada di wilayah Cilnggang terutama RW 12 yang terdapat Kampung KB masyarakat disana sangat antusias dengan kegiatan yang diadakan oleh kader wilayah cilenggang.

Maka kekurangan nya adalah teknis yang kurang terstruktur dalam kegiatan tersebut serta kurang nya kader sehingga membuat terhambat kegiatan yang ada di kampung KB Wilayah Cilenggang.

Menurut Agarwal (2011), program keluarga berencana telah diakui sebagai faktor paling efektif dalam intervensi masalah kesehatan secara global. Menurut Miller (2014), keluarga berencana merupakan program yang memiliki kuantitatif paling sederhana namun praktis bermakna dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga. Menurut Sari (2010), program Keluarga Berencana (KB) yang diwujudkan pada penggunaan kontrasepsi juga memiliki manfaat yang bersifat langsung atau tidak langsung bagi kesehatan ibu, bayi dan anak, kesehatan dan kehidupan reproduksi dan seksual keluarga, dan kesejahteraan serta ketahanan keluarga.

Menurut BKKBN (2015), kampung keluarga berencana adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Bentuk kegiatan yang ada di kampung Maka tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui evaluasi kegiatan kampung keluarga berencana dalam

upaya peningkatan efektivitas program keluarga berencana di wilayah Cilenggang Kota Tangerang Selatan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi dan pendata di setiap kegiatan Kampung KB. Teknik pengumpulan dan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara. Penarikan informan akan dilakukan kurang lebih 5 informan kader yang ada di wilayah kampung KB. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan tahapan Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan, Uji keabsahan data dilakukan dengan Triangulasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasumber dalam penelitian ini terdapat 5 orang, di wilayah kampung KB Cilenggang terdapat kader yang berjumlah 15 orang yang terbagi menjadi 5 kader BKB (Bina Keluarga Balita), 5 kader BKL (Bina Keluarga Lansia), 5 kader BKR (Bina Keluarga Remaja), 5 kader UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), 5 kader Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), serta 5 kader PKB (Penyuluh Keluarga Berencana). Secara administratif jumlah kader dalam satu kelompok kerja telah memenuhi syarat namun secara teknis pelaksanaan kader yang bekerja belum memenuhi syarat karena masih banyaknya kader yang tugasnya merangkap.

PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) yang di tugaskan untuk membina kelurahan Cilenggang tidak hanya membina satu kelurahan saja namun ada 5 kelurahan yang dibina sehingga petugas PLKB menjadi kurang efektif dan kurang fokus dalam melaksanakan pembinaan sehingga menghambat keberhasilan program. Menurut Pasrah (2014), faktor penghambat keberhasilan program KB diantaranya adalah rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh instansi terkait pelaksanaan program keluarga berencana. Menurut Grestina (2013), salah satu faktor penghambat keberhasilan program KB adalah kurangnya jumlah petugas lapangan KB yang mengakibatkan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang program KB. Serta faktor penghambat di wilayah Cilenggang yaitu kurang terstruktur nya teknik pada saat kegiatan karena masyarakat di sana sangat antusias

dalam kegiatan posyandu yang ada sehingga menjadikan kegiatan posyandu yang ada di kampung KB kurang kondusif dan efektif.

Maka dibentuknya pemberdayaan yang digunakan dalam program kampung keluarga berencana adalah pemberdayaan partisipatif. Petugas PLKB atau penyuluh KB hanya bersifat sebagai pembina dalam kegiatan tersebut. Maka dalam program kampung keluarga berencana ini hanya bertugas sebagai monitoring kegiatan yang berjalan. Jenis pembinaan yang dilakukan adalah dengan pembinaan berjenjang. Pembinaan berjenjang yang dimaksud adalah pemerintah kota melakukan koordinasi dengan petugas PLKB kemudian untuk pembinaan langsung di kelurahan dilakukan oleh PLKB kecamatan yang membina sub PPKBD (sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) yang menjadi perwakilan kader. Dari sub PPKBD kemudian membina dan melaksanakan program yang ada di kampung keluarga berencana.

5. KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini bahwa program kampung keluarga berencana ini masih adanya kekurangan seperti kurang teknis di lapangan sehingga di kurang kondusif dan efektif di kegiatan tersebut. Serta masih banyak nya kader yang tugas nya masih merangkap bukan hanya satu tugas saja.

Saran dalam penelitian ini adalah bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya meneliti dari aspek evaluasi proses pemberdayaan masyarakat saja namun juga aspek yang lain selain pemberdayaan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2015. *Profil Kependudukan Indonesia*. Jakarta: BPS

Diakses pada 4 september 2019
<https://tangseltkota.bps.go.id/dynamictable/2017/05/09/49/jumlah-penduduk-kota-tangerang-selatan.html>

Agarwal. 2011. Family Planning Why The United States Should Care. *International Journal Of Environmental Researchh and Public Health*, 2(8):788-795

- BKKBN. 2015. *Petunjuk Teknis Kampung Keluarga Berencana*. Jakarta: BKKBN
- Miller, G., Babiari, S.K. 2014. Family Planning and Program Effects. *Journal of United States of America*, 4(3): 314-323
- Sari, K. S. 2010. Hubungan Konseling Keluarga Berencana (KB) dengan Pengambilan Keputusan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi. *Journal Ilmiah Kebidanan*, 1 (1): 767-778.
- Mardikanto, T., Soebianto, P. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Widjajanti, K. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat, *Journal Ekonomi Pembangunan*, 1 (1): 15-27
- Pasrah, R., Tri, S. P., Toti, I. 2014. Efektivitas program keluarga berencana dalam menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru. *Jom Fekom*, 1(2): 318-344.